

POLICY BRIEF

ISSN : 25273132 E-ISSN : 25033379

Special Issue Policy Brief and Policy Paper February, 2024

JUDUL MAKSIMAL 20 KATA, DENGAN FONT CAMBRIA, UKURAN 11 POIN DAN BOLD**Nama Penulis**

Afiliasi penulis

Email: email@gmail.com

Ringkasan Eksekutif

Perjuangan untuk mengurangi prevalensi *stunting* menjadi 14% menghadapi tantangan besar di Indonesia. Mengapa penurunan dalam prevalensi *stunting* selama dua tahun terakhir (2021 dan 2022) hanya sedikit sekali, dari 24,4% menjadi 21,6%? Tentunya hal ini membutuhkan analisis kritis. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya terkait masalah infrastruktur, aksesibilitas layanan kesehatan yang terbatas, dan praktik gizi yang belum optimal. Disamping itu, perbaikan yang terbatas menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang kebijakan, program, dan strategi implementasi yang ada. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan rekomendasi kebijakan antara lain pendekatan lintas-sektoral melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Prioritas diberikan pada peningkatan akses kesehatan, pengembangan infrastruktur, dan meningkatkan literasi gizi di masyarakat. Kerjasama aktif di antara para pemangku kepentingan dan implementasi kebijakan yang efektif muncul sebagai kunci untuk mencapai penurunan substansial dalam prevalensi *stunting* dan menuju target 14%, memastikan masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia.

Kata Kunci: Prevalensi *stunting*, Penurunan minimal, Tantangan implementasi, lintas-sektoral, akses Kesehatan

Pendahuluan

Stunting, sebagai masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, menjadi fokus kritis dalam perjalanan menuju pencapaian target prevalensi 14%. Keberhasilan mengatasi *stunting* memiliki dampak langsung pada kesehatan dan perkembangan anak-anak, serta menentukan arah visi "Generasi Emas" Indonesia pada tahun 2045. Pada dua tahun terakhir, penurunan prevalensi *stunting* yang minim menciptakan keprihatinan mendalam, mendorong pertanyaan esensial mengenai faktor-faktor penghambat dan strategi yang diperlukan. Tantangan infrastruktur, aksesibilitas layanan kesehatan yang terbatas, dan ketidakefektifan praktik gizi menjadi sorotan kritis dalam merumuskan kebijakan efektif. Inilah latar belakang mendesak yang melandasi pembahasan lebih lanjut mengenai mengapa penurunan

prevalensi *stunting* terbukti sulit di tahun 2021 dan 2022, dan urgensi strategi berkelanjutan untuk mencapai target ambisius 14%.

Deskripsi Masalah

Aspirasi Indonesia untuk menciptakan 'Generasi Emas' pada tahun 2045 dihadapkan pada ancaman serius akibat masalah *stunting* yang sedang berkecamuk di dalam negeri. Menurut World Health Organization (2023), prevalensi *stunting* dalam kisaran 20% hingga 30% dianggap sebagai isu penting bagi kesehatan masyarakat. *Stunting*, yang ditandai oleh gizi yang kurang dan infeksi berulang, menyebabkan tinggi atau panjang badan anak-anak berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh kementerian yang bertanggung jawab atas kesehatan di Indonesia (Republik Indonesia, 2021).

Tantangan Penurunan Stunting di Indonesia

Tantangan dalam mencapai prevalensi *stunting* 14% di Indonesia cukup kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Meskipun pemerintah telah mencanangkan target penurunan *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024, penurunan prevalensi *stunting* dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2022) sangat kecil.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tantangan ini meliputi:

1. Kurangnya perubahan Signifikan, dimana Data nasional menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa *stunting* memerlukan penanganan yang cepat dan terintegrasi (Adam, A., & Mas'ud, H. 2022).
2. Kurangnya pengetahuan, seperti halnya banyak masyarakat dan pelaksana program di tingkat akar rumput yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang *stunting*, dampaknya, faktor penyebabnya, dan cara penanggulangannya (Archda, R., & Tumangger, J. 2019)
3. Kebijakan dan koordinasi yang belum optimal, Meskipun banyak kebijakan pemerintah yang dilahirkan sebagai upaya percepatan penanggulangan *stunting*, angka penurunan *stunting* masih jauh dari yang ditargetkan. Selain itu, koordinasi antara berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan BKKBN dalam melaksanakan program penanggulangan *stunting* juga belum optimal (Archda, R., & Tumangger, J. 2019)

Prevalensi *stunting* di Indonesia tetap tinggi selama lima periode pengukuran terakhir. Hasil Survei Status Gizi di Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* mencapai 21,6% pada tahun tersebut (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Pada tahun sebelumnya, yaitu 2021, berdasarkan SSGI, prevalensi *stunting* mencapai 24,4%, mengalami penurunan yang sangat kecil, hanya sebesar 2,8% dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, Mengapa penurunan prevalensi *stunting* mengalami penurunan yang sangat kecil dalam dua tahun terakhir, dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif terkait upaya yang tepat agar penurunan masalah *stunting* dapat memenuhi target optimal, yaitu 14% di tahun 2024.

Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Stunting di Indonesia

Bentuk komitmen pemerintah dalam upaya penurunan angka *stunting* sudah dilakukan cukup panjang, upaya-upaya tersebut telah dikeluarkan dalam bentuk kebijakan pemerintah, saat ini telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi stunting. Berikut beberapa kebijakan tersebut:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*: Menetapkan 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu pelatihan keluarga, pelatihan sekolah, pelatihan komunitas, pelatihan pemerintah dan pelatihan sektor swasta.¹
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif: Mengatur tentang pemberian ASI eksklusif kepada ibu yang mengandung anak di bawah usia 2 tahun.²
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013: Menetapkan standar minimum yang harus diterapkan pada pasca dan mendulang untuk meningkatkan kualitas gizi dan mencegah *stunting*.³

Terlepas dari kebijakan ini, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam koordinasi dan investigasi yang optimal untuk mengatasi keterlambatan pembangunan. Hal ini terlihat dari koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN, dan lembaga pemerintah lainnya yang melaksanakan program pencegahan stunting. Selain itu, beberapa kebijakan pemerintah masih belum mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga tujuan penurunan stunting masih jauh.⁴

Kenapa stunting sulit diturunkan dengan cepat?

Penurunan *stunting* secara cepat sulit dicapai karena banyaknya hambatan dalam penerapan kebijakan penurunan stunting di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain permasalahan koordinasi dan survei antar instansi pemerintah, beberapa kebijakan yang tidak mencapai sasaran, permasalahan standarisasi pelayanan kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta hambatan tata kelola seperti optimalisasi pemanfaatan anggaran pusat daerah hingga desa untuk menysasar *stunting*. Selain itu, stunting juga merupakan masalah gizi kronis dimana tumbuh kembang anak terganggu akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang. Upaya penanggulangan stunting memerlukan perbaikan pola makan dan pola pengasuhan, pemeliharaan sanitasi yang sehat dan bersih, peningkatan kualitas gizi makanan, dan program pemerintah untuk mengurangi *stunting*. Meskipun terdapat hambatan dalam penerapan kebijakan penurunan stunting, upaya penanggulangan stunting di Indonesia terus dilakukan dan digalakkan oleh pemerintah.

Selain itu, peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mewajibkan konvergensi terpadu di seluruh provinsi dan desa di Indonesia untuk bersinergi dalam mempercepat penurunan *stunting*.

¹ <https://lms>

[elearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18037/mod_resource/content/1/4.%20Buku%20Kebijakan%20Dan%20Strategi%20Percepatan%20Penurunan%20Stunting%20Di%20Indonesia.pdf](https://lms.elearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18037/mod_resource/content/1/4.%20Buku%20Kebijakan%20Dan%20Strategi%20Percepatan%20Penurunan%20Stunting%20Di%20Indonesia.pdf)

² Latifa Suhada Nisa (2018), Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia, JURNAL Kebijakan Pembangunan Volume 13 Nomor 2 Desember 2018: 173 - 179 ISSN 2085-6091 Terakreditasi No: 709/Akred/P2MI-LIPI/10/2015

³ *ibid*

⁴ Febrian, F., and R. Yusran. "Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang". Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), Vol. 3, no. 1, Mar. 2021, pp. 11-21, doi:10.24036/jmiap.v3i1.214.

Implementasi kebijakan integrasi sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan pemerintah serta kondisi sosial, ekonomi, geografis dan masyarakat. Dalam penerapan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Percepatan *Stunting*, terdapat berbagai upaya yang dilakukan, termasuk pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pendampingan calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), dan surveilans keluarga berisiko *stunting* (Dermawan, et al 2022). Selain itu, edukasi mengenai pemberian suplemen *vitamin A, Iodium, Zink*, dan Zat Besi juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka *stunting* (Anindita et al, 2022).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala juga, seperti tingkat integrasi kebijakan yang belum tinggi di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan integrasi kebijakan dan koordinasi antar instansi guna memastikan keberhasilan program penurunan *stunting* (Supriyanto, A.T., & Jannah, L.M, 2022).

Selain kebijakan, perlu juga menjadi perhatian bahwa ada beberapa faktor lain yang berkontribusi pada lambatnya penurunan *stunting* dari 24,4% menjadi 21,6% dalam dua tahun terakhir di Indonesia, yang mengancam pencapaian Generasi Emas Indonesia di tahun 2045. Berikut ini adalah faktor-faktornya:

1. Kemiskinan: Kemiskinan merupakan faktor utama penyebab *stunting* di beberapa daerah. Kemiskinan dapat mempengaruhi asupan gizi anak-anak dan menyebabkan retardasi pertumbuhan fisik dan mental.
2. Asupan gizi yang tidak mencukupi pada anak: Asupan gizi yang tidak mencukupi pada anak juga menjadi faktor penyebab *stunting*. Kurangnya asupan nutrisi dapat memperlambat perkembangan otak dan menyebabkan retardasi pertumbuhan.
3. Budaya pernikahan dini: Budaya pernikahan dini juga merupakan faktor penyebab *stunting* di beberapa daerah. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, sehingga menyebabkan retardasi pertumbuhan pada anak.
4. Infrastruktur lingkungan yang tidak sehat: Infrastruktur lingkungan yang tidak sehat, seperti kurangnya air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, juga dapat mempengaruhi kasus *stunting*. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyediakan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak di daerah yang membutuhkannya.

Untuk mencegah *stunting*, perlu perbaikan asupan gizi, sanitasi, dan kondisi kehidupan. Pencegahan *stunting* dapat dicapai melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kualitas pangan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi yang layak, serta pelaksanaan program penurunan *stunting* oleh pemerintah.

Hasil Survey Online

Pada awal tahun 2023, Sekretariat *Stunting* BKKBN melakukan survei *online* berdasarkan Laporan dan Rencana Aksi Penurunan *Stunting* 2023 (Widasari, 2023). Survei ditujukan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa dengan metode non-probabilistik sampling. Periode survei pada 29 Januari 2023 hingga 5 Februari 2023, dan total 4.818 responden berpartisipasi dalam survei tersebut. Mayoritas responden berasal dari TPPS desa, dengan 3.762 responden atau 78,1%. Survei memakan waktu 10 hingga

15 menit untuk diselesaikan. Hasil survei dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor hilir yang menyebabkan percepatan penurunan stunting tidak signifikan dalam dua tahun terakhir (2021-2022). Survei mengungkapkan bahwa faktor utamanya adalah koordinasi dan investigasi yang belum optimal antar instansi pemerintah, kebijakan yang belum mencapai targetnya, masalah terkait standarisasi pelayanan kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta tantangan dalam tata kelola pemerintahan seperti optimalisasi pemanfaatan anggaran dari pusat hingga tingkat desa.

Tabel 2. Hasil Survey Online

No.	Faktor	Hasil Analisis
1	Koordinasi, Tugas, dan Peran TPPS	Mayoritas responden menganggap koordinasi TPPS baik di semua jenjang (91,4%). Implementasi intervensi spesifik dan sensitif dalam PPS dinilai berjalan baik (94,1%). Anggota TPPS mayoritas sudah mengetahui tugas dan peran mereka.
2	Hambatan Utama	Terdapat tiga hambatan utama: Penganggaran (13,9%), Sumber Daya Manusia (11,5%), dan Pemahaman Peran dan Tanggung Jawab (11,2%).
3	Komitmen	33% responden menyatakan adanya hambatan terkait komitmen, dengan mayoritas (45%) menyoroti kurangnya pemahaman konvergensi dan 39,2% merasa kurangnya komitmen lintas sektor.
4	Perencanaan	33% responden melaporkan hambatan terkait perencanaan, termasuk 54,4% yang merasa adanya hambatan dalam pemetaan program lintas sektor. Sebesar 29,1% menyatakan kesulitan dalam sinkronisasi antara aksi konvergensi dan siklus perencanaan.
5	Sumber Daya Manusia (SDM)	Sebanyak 56% responden menyatakan hambatan terkait SDM, dengan 33,2% karena kurangnya pemahaman peran dan tanggung jawab, dan 28% merasa kurang optimalnya kemampuan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
6	Pelaksanaan MONEV	43,8% responden mengidentifikasi hambatan terkait pelaksanaan MONEV. Sebagian besar (41,9%) merasa MONEV belum dilaksanakan secara terpadu. Hambatan lain termasuk kurangnya pembaguan peran MONEV, kapasitas terbatas, dan ketiadaan pedoman MONEV di lapangan.
7	Intervensi Spesifik	Sebanyak 50% responden melaporkan hambatan terkait intervensi spesifik, termasuk 37,2% yang merasa sarana dan prasarana belum optimal, serta 18% yang menyebutkan hambatan budaya seperti mitos dan tabu.
8	Intervensi Sensitif	36,6% responden menyatakan adanya hambatan pada intervensi sensitif. Hambatan meliputi sarana dan prasarana yang belum optimal (33,3%), dukungan lintas sektor yang rendah untuk edukasi dan penggerakan (23,7%), dan kendala dalam melakukan pendampingan pada kelompok sasaran (12,4%).

9	Penganggaran	77,5% responden melaporkan hambatan terkait penganggaran, dengan 36% merasa terbatasnya anggaran dan 25,2% mengeluhkan ketidakjelasan besaran pendanaan di setiap tingkatan.
---	--------------	--

Dari beberapa analisis dan hasil survey online yang dilakukan, maka perlu upaya yang komprehensif dalam mendorong percepatan penurunan stunting, tidak saja persoalan di hulu yang menjadi penyebab stunting namun juga faktor hilir perlu juga menjadi perhatian dan pertimbangan dalam percepatan penurunan stunting, antara lain:

Faktor Hulu:

1. Kebijakan Pemerintah: Meskipun telah banyak kebijakan pemerintah yang dilahirkan sebagai upaya percepatan penanggulangan stunting, namun angka penurunan stunting masih jauh dari yang ditargetkan.
2. Pernikahan Usia Dini: Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia, dan telah diketahui memiliki dampak buruk pada kesehatan ibu serta pertumbuhan anak stunting.

Faktor Hilir:

1. Kurangnya Pengetahuan: Masih terdapat banyak masyarakat maupun implementer program di level akar rumput yang belum memiliki penguasaan pengetahuan yang memadai terkait stunting itu sendiri, baik dampaknya, faktor penyebabnya, hingga cara penanggulangannya.
2. Kurangnya Sosialisasi: Sosialisasi secara massif terkait stunting, dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan stunting pada tataran akar rumput masih sangat diperlukan.
3. Kurangnya Integrasi Kebijakan: Keberhasilan program penurunan stunting belum didukung dengan tingkat integrasi kebijakan yang tinggi.
4. Kurangnya Edukasi Penggunaan Suplemen: Edukasi kepada masyarakat mengenai pemberian suplemen vitamin A, Iodium, Zink, dan Zat Besi sebagai upaya perwujudan program pencegahan stunting untuk mempercepat penurunan angka stunting masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi Kebijakan

Tantangan dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tahun 2024	Rekomendasi Kebijakan
Perlunya Penanganan yang Cepat dan Terintegrasi untuk Penurunan <i>Stunting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri perlu terus memastikan Program Terpadu yang Terintegrasi dan Berkelanjutan melalui 8 aksi konvergensi. Delapan Aksi Konvergensi adalah sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong upaya yang terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i> di daerah. 2. Kementerian Kesehatan harus melakukan upaya-upaya, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri yang dapat diawali

	<p>dengan kegiatan di sekolah-sekolah yaitu dengan 3 paket intervensi yakni pemberian TTD mingguan bagi remaja putri, mempromosikan aktivitas fisik dan konsumsi makanan bergizi seimbang</p> <p>b. Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil termasuk pemeriksaan kehamilan dan pemberian suplemen nutrisi.</p> <p>c. Memberikan tambahan pangan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan.</p>
<p>Kurangnya pengetahuan masyarakat dan pelaksana program di tingkat akar rumput yang memadai tentang stunting</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKKBN bersama dengan Kementerian Agama melakukan Penguatan Pengembangan Program Edukasi <i>Stunting</i> di Masyarakat melalui edukasi kepada calon pengantin dengan melaksanakan penilaian status gizi secara <i>virtual</i> 3 bulan sebelum pernikahan, agar calon ibu atau calon pengantin siap lahir dan batin sehingga tidak melahirkan generasi stunting. 2. BKKBN harus selalu terus melakukan re-orientasi dan pelatihan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK). Orientasi dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota TPK. Tugas TPK secara khusus meliputi identifikasi keluarga sasaran yang akan dilakukan pendampingan, pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, dan pemberian rujukan jika diperlukan.
<p>Kebijakan dan koordinasi yang belum optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia selaku pengarah sesuai Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu secara berkala mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) <i>Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota maupun mitra terkait.</i> 2. BKKBN harus memastikan dan terus memantau terkait pelaksanaan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan penyediaan satu data stunting kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan hingga ke tingkat layanan.

Referensi

- Anindita, R.Y., Putri, I.K., Beandrade, M.U., Nathalia, D.D., & Perwitasari, M. (2022). Edukasi Penggunaan Suplemen Vitamin A, Iodium, Zink, dan Zat Besi dalam Pencegahan Stunting. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Dermawan, A., Mahanim, M., & Siregar, N. (2022). Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Bangun Abdimas*.
- Fatmaningrum, A., Nadhiroh, S. R., Raikhani, A., Utomo, B., Masluchah, L., & Patmawati. (2022). Analisis Situasi Upaya Percepatan Penurunan Stunting dengan Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting (Studi Kasus di Kabupaten Jombang Jawa Timur). *Media Gizi Indonesia*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2023, January 25). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

- Rahmawati, A., Baroya, N. mal, Permatasari, Elok, Nurika, G., & Yusi Ratnawati, L. (2022). Potret Persepsi Nilai Gender Dalam Program Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), 31-38. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1SP.31-38>
- Rahmawati, D., Soedjono, E. S., Soedarso, S., Margini, N. F., & Mukodi, M. (2022). Pembuatan Protipe Sarana Air Bersih Sebagai Solusi Alternatif Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pacitan. *Media Gizi Indonesia. Republik Indonesia*. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Saptarini, I., Arfines, P. P., Novianti, & Permanasari, Y. (2023). Hubungan status gizi dan morbiditas balita pada desa lokus dan non lokus di 13 kabupaten lokus stunting di Indonesia tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*.
- Supriyanto, A.T., & Jannah, L.M. (2022). Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak. *Sosio Konsepsia*.
- Widasari, L., Dr. dr, M. Si. (2023). Laporan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 Dan Rencana Aksi Tahun 2023. *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*.
- World Health Organization. (2023). Malnutrition in children. NUTRITION LANDSCAPE INFORMATION SYSTEM (NLIS) Nutrition and Nutrition-Related Health and Development Data. <https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/malnutrition-in-children>